

## Tambah Alkes Dokter Spesialis Dapat Anggaran Rp17 M, Tempat Tidur RSUD Taman Husada Jadi 240 Unit



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Kamis, 01/2/2024

Alat kesehatan di RSUD Taman Husada terus dilengkapi Pemkot Bontang. Tahun ini anggaran untuk pengadaan sejumlah alkes dengan anggaran mencapai Rp17 miliar.

**BONTANG** - “Jadi, pembelian kali ini untuk melengkapi alat kesehatan sehubungan dengan kebutuhan layanan dokter spesialis,” kata Dirut RSUD Taman Husada Dr. Suhardi.

Barang utama yang dibutuhkan ialah tempat tidur. Semula RSUD Taman Husada meminta tambahan 100 ranjang tidur pasien. Tetapi dari pagu anggaran hanya bisa mengakomodasi sekitar 40 unit. Saat ini RSUD sudah memiliki 200 tempat tidur pasien. “Kondisinya ada yang minta diganti karena tidak berfungsi dengan baik. Sebab, ada yang pengadaannya dari zaman rumah sakit berdiri pada tahun 2007,” ucapnya.

Selain itu, ada alat kesehatan untuk kebutuhan dokter spesialis kulit, THT, paru, dan kandungan. Penyebab pengadaan alat kesehatan tersebut ada yang selama ini tidak memiliki sarana tersebut, berusia lama, maupun untuk jenis layanan baru. “Semisal ada penanganan pasien di spesialis kulit sebelumnya tidak tertangani karena belum punya alatnya, makanya kami ajukan,” tutur dia.

Berdasarkan data, alat kesehatan yang diajukan meliputi *magnetic stimulator*, *USG biometry+pachymetry*, *powered table*, *UV*, *phototherapy*, *refrigerated centrifuge*, *laminar air flow*, lemari steril, lemari *instrument*, *bedside cabinet*, *overbed table*, *microwave diathermy*.

Kemudian *stationary training equipment quadriceps bench, ultraviolet lamp*, pesawat sinar X, *Carm, electrical hospital bed, emergency trolley, USG, manual hospital bed, keratometer*, alat bedah mata, *defibrillator, treadmill, dan tree pulley*. “Skema pengadaannya itu pakai e-katalogi,” terangnya.

Terkait alat MRI yang dibeli tahun lalu, akan dimanfaatkan bulan depan. Ruangan pun telah selesai penyempurnaan. Bahkan alat sudah melewati uji fungsi. “MRI sudah bisa *running* bulan depan. Sudah bisa digunakan pasien BPJS,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot Bontang mengucurkan anggaran Rp36 miliar untuk pengadaan MRI.

MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. MRI sering dilakukan dan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya.

**(ak/ind/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Tambah Alkes Dokter Spesialis Dapat Anggaran Rp17 M, Tempat Tidur RSUD Taman Husada Jadi 240 Unit, 01/02/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit diatur bahwa Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa setiap alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://latihan-lpse.lkpp.go.id/inaproclat/berita/Aplikasi/E-katalog-LKPP-Tambah-Fitur-Fasilitas--Pelayanan-Informasi>, e-katalog adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.